

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Ketimpangan masih menjadi masalah bagi setiap negara khususnya negara berkembang seperti halnya Indonesia, tingkat ketimpangan di Indonesia relatif tinggi dan naik lebih pesat dibanding banyak negara Asia Timur lain, masih banyak daerah yang kesenjangan terlalu timpang antara perkotaan dan pedesaan, masih banyak pekerjaan bagi pemerintah dalam mengatasi ketimpangan di Indonesia.

Ketimpangan pendapatan mengacu pada distribusi pendapatan yang tidak merata di antara individu atau rumah tangga di dalam masyarakat atau negara tertentu. Ketimpangan pendapatan adalah masalah ekonomi dan sosial yang signifikan yang telah diperdebatkan secara luas oleh para pembuat kebijakan, ekonom, dan ilmuwan sosial. Ketimpangan pendapatan memiliki banyak dampak negatif pada individu dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik, peningkatan angka kriminalitas, penurunan mobilitas sosial, dan penurunan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, mengurangi ketimpangan pendapatan telah menjadi tujuan penting bagi para pembuat kebijakan dan masyarakat secara keseluruhan.

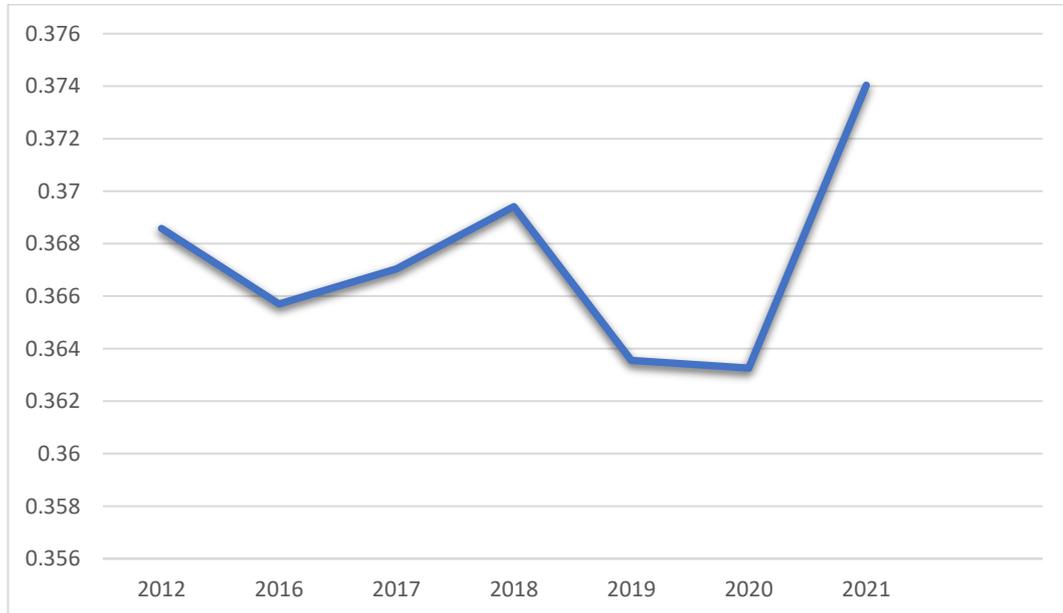
Ketimpangan pendapatan telah menjadi ciri khas banyak masyarakat sepanjang sejarah, tetapi tingkat dan penyebabnya bervariasi dari waktu ke waktu dan di berbagai negara. Secara umum, ketimpangan pendapatan cenderung lebih tinggi di negara-negara berkembang dan lebih rendah di negara-negara maju. Ketimpangan pada dasarnya disebabkan adanya perbedaan sumber daya alam dan

perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat adanya perbedaan ini potensi atau kemampuan pada suatu wilayah mendorong proses pembangunan yang berbeda pula. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila pada suatu wilayah biasanya terdapat wilayah maju dan wilayah terbelakang. Ketimpangan pembangunan juga dapat dilihat secara vertikal (perbedaan distribusi pendapatan), dan secara horizontal (perbedaan antar wilayah maju dan terbelakang) (Sjafrizal 2008, dalam Dwiputra 2018).

Ketimpangan wilayah disebabkan juga karena adanya perbedaan kondisi demografi yang cukup besar antar wilayah. Kondisi demografis dalam suatu wilayah meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur dari kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan yang dimiliki masyarakat daerah yang bersangkutan. Kondisi demografis berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat dalam suatu daerah. Kondisi demografis yang baik cenderung meningkatkan produktivitas kerja, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. BPS mendefinisikan Indeks Gini sebagai salah satu indikator dalam mengukur ketimpangan pendapatan. Indeks Gini adalah ukuran ketimpangan agregat yang angkanya berkisar antara nol hingga satu. Oshima menetapkan sebuah kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah pola pengeluaran suatu masyarakat ada pada ketimpangan taraf rendah, sedang, atau tinggi. Untuk itu ditentukan kriteria sebagai berikut :

1. Ketimpangan taraf rendah, bila $G < 0,35$
2. Ketimpangan taraf sedang, bila G antara $0,35 - 0,5$

3. Ketimpangan taraf tinggi, bila $G > 0,5$

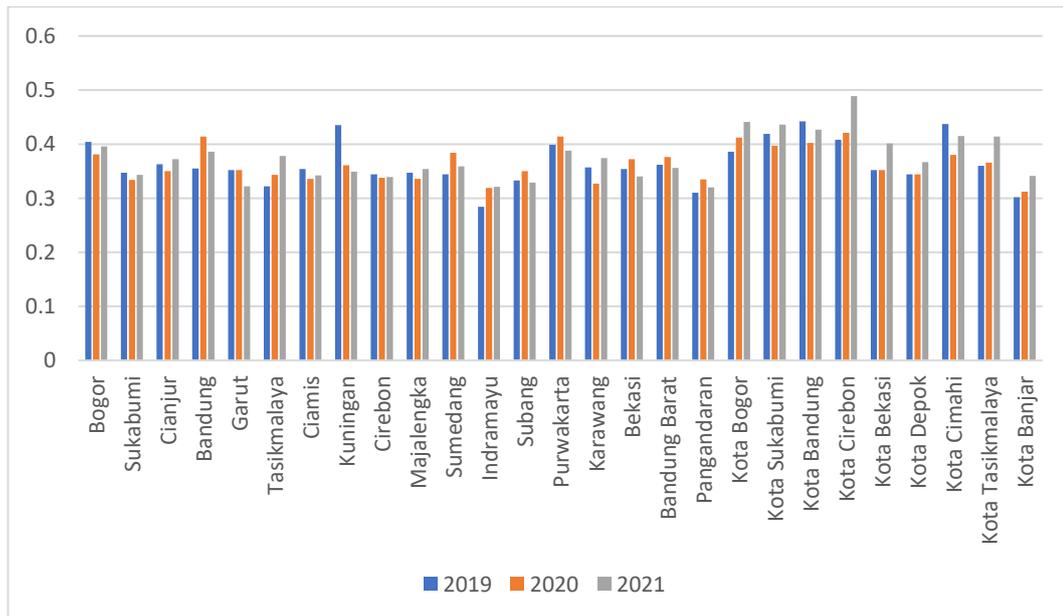


Gambar 1.1 Gini Rasio Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021

Sumber: BPS Jawa Barat 2023

Berdasarkan gambar 1.1 gini rasio Provinsi Jawa Barat dari tahun 2012-2021 berfluktuasi. Pada tahun 2021 merupakan indeks gini yang paling tinggi sebesar 0,374 persen yang berarti indeks rasio di Provinsi Jawa Barat masuk ke taraf ketimpangan yang sedang. Sedangkan indeks gini rasio Provinsi Jawa Barat yang paling kecil terjadi pada tahun 2020 sebesar 0,363 persen yang berarti indeks rasio Provinsi Jawa Barat masuk ke taraf ketimpangan yang sedang.

Ketimpangan di Provinsi Jawa Barat yang berfluktuatif dari tahun 2012-2021 menandakan bahwa indeks gini rasio di Provinsi Jawa Barat tidak stabil, Tetapi masih dalam taraf indeks rasio yang masih stabil.



Gambar 1.2 Gini Rasio Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021

Sumber: BPS Jawa Barat 2023

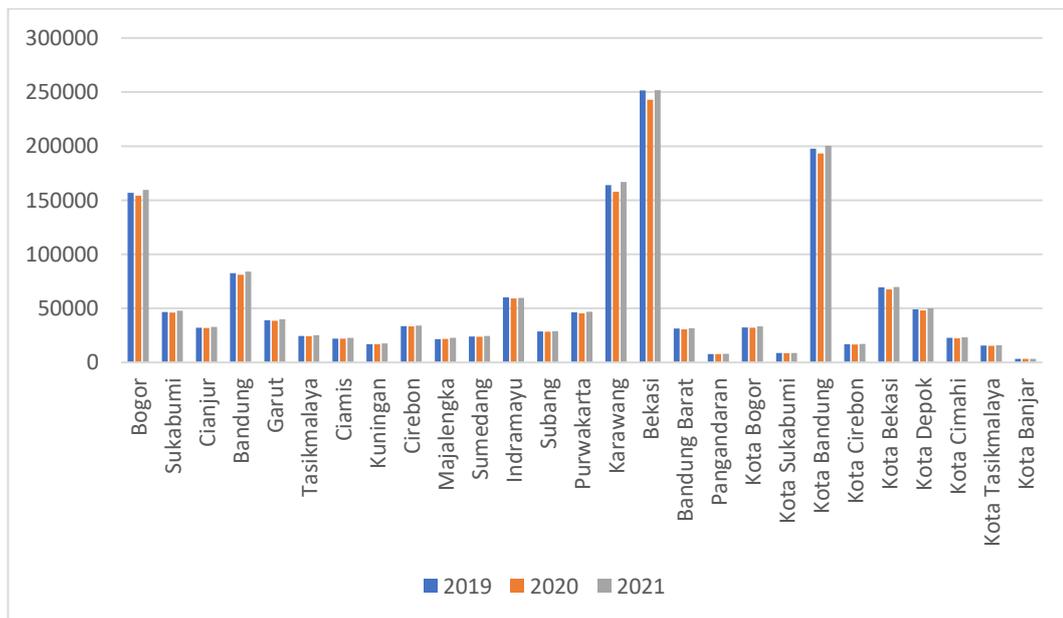
Gambar 1.1 menunjukkan bahwa indeks gini di Jawa Barat masih tergolong pada distribusi pendapatan yang relatif merata atau pada ketimpangan taraf sedang dimana Indeks Gini sebagai ukuran pemerataan pendapatan mempunyai selang nilai antara 0 sampai dengan 1. Nilai 0 menunjukkan pemerataan yang sempurna, semakin mendekati angka nol bermakna bahwa tingkat pemerataan dari suatu variabel cukup baik. Sedangkan nilai 1 menunjukkan ketimpangan yang paling tinggi yaitu satu orang menguasai semua pendapatan, semakin mendekati angka satu menandakan bahwa telah terjadi ketimpangan atau ketidakmerataan.

Pada umumnya setiap negara di dunia memiliki tujuan utama yaitu meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan seluruh rakyatnya melalui peningkatan pembangunan ekonomi suatu negara. Pembangunan merupakan suatu

proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap mental yang sudah terbiasa dan lembaga-lembaga. Jurnal nasional termasuk pula percepatan/akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan dan pemberantasan kemiskinan yang absolut (Todaro, 2003: 115).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauhmana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan apabila seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah pada periode tertentu adalah tingkat pertumbuhan Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) riil.

Salah satu indikator tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah adalah angka PDRB. PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode (Hadi Sasana, 2001). Sedangkan PDRB per kapita sering digunakan sebagai indikator pembangunan. Semakin tinggi PDRB per kapita suatu daerah maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut dikarenakan semakin besar pendapatan masyarakat daerah tersebut (Thamrin, 2001). Hal ini berarti juga bahwa semakin tinggi PDRB per kapita semakin sejahtera penduduk suatu wilayah. Dengan kata lain, jika pendapatan tinggi dan merata antar daerah maka ketimpangan pendapatan berkurang.

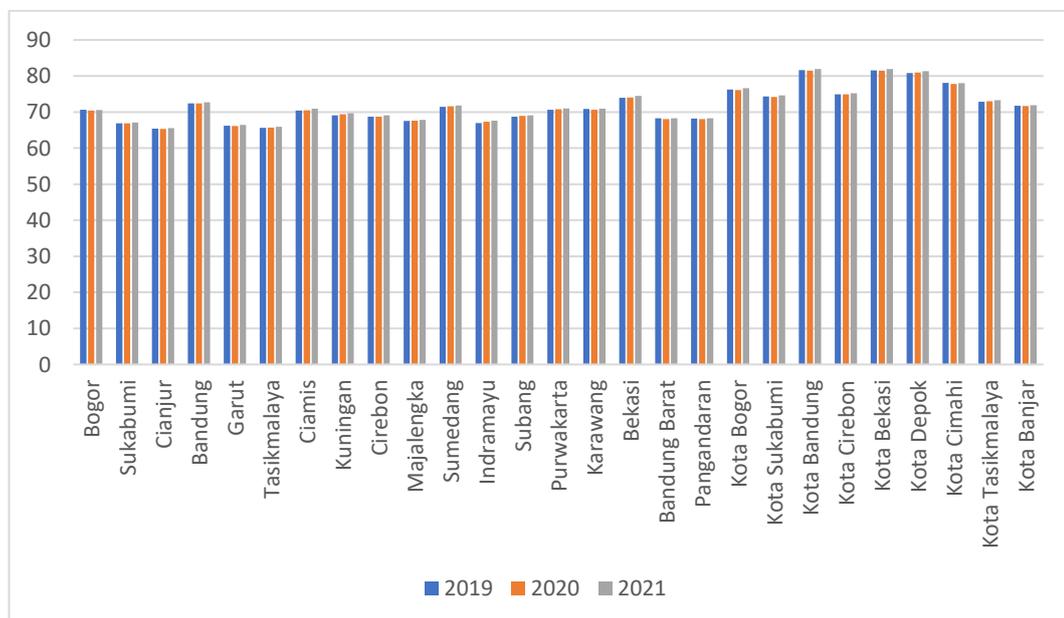


Gambar 1.3 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi Tahun 2019-2021

Sumber : BPS Jawa Barat 2023

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa adanya perbedaan PDRB antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Dilihat dari nilainya, terlihat bahwa perbedaan PDRB antar Kabupaten/Kota sangat terlihat tidak merata. Pembangunan di Provinsi Jawa Barat yang berlangsung secara menyeluruh dan berkesinambungan telah meningkatkan perekonomian masyarakat. Pencapaian hasil-hasil pembangunan yang sangat dirasakan masyarakat merupakan agregat pembangunan dari 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang tidak terlepas dari usaha keras secara bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat. Potensi daerah dan kekayaan alam dapat dilihat sebagai keunggulan komparatif bagi daerah, namun di sisi lain berbagai kendala seperti sumber daya manusia dan modal untuk memanfaatkan potensi tersebut masih dihadapi oleh penentu kebijakan baik tingkat provinsi maupun di tingkat daerah kabupaten/kota.

Pembangunan ekonomi dapat dikatakan berhasil apabila suatu wilayah/daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat secara merata atau yang lebih dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Rendah atau tingginya IPM akan berdampak pada tingkat produktivitas penduduk, semakin rendah IPM maka tingkat produktivitas penduduk juga akan rendah kemudian produktivitas yang rendah akan berpengaruh pada rendahnya pendapatan, begitu pula sebaliknya semakin tinggi IPM maka akan semakin tinggi tingkat produktivitas penduduk yang kemudian mendorong tingkat pendapatan menjadi semakin tinggi. Permasalahan yang terjadi adalah IPM pada tiap daerah itu berbeda, hal ini menjadikan IPM salah satu faktor yang berpengaruh pada ketimpangan pendapatan antar daerah/wilayah.



Gambar 1. 4 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi di Pulau Jawa tahun 2019-2021

Sumber : BPS Jawa Barat 2022

Berdasarkan tabel 1.3 di atas dapat diketahui bahwa berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik tahun 2019-2021 pada tabel 1.3 menunjukkan bahwa pemerataan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau dikenal Human Development Index (HDI) di Jawa Barat masih tergolong rendah.

Perbedaan ini dapat menjadikan IPM sebagai salah satu alat untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Terdapat tiga indikator yang menjadi komposisi sebagai perbandingan pengukuran IPM yakni, tingkat kesehatan, tingkat pendidikan dan standar kehidupan dimana ketiga indikator ini saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi, untuk meningkatkan IPM pemerintah harus memperhatikan ketiga unsur tersebut di samping itu perlu juga diperhatikan faktor-faktor pendukung lainnya, seperti kesempatan kerja, infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi.

Kesenjangan pendapatan antar daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat haruslah menjadi salah satu pertimbangan dalam perencanaan pembangunan. Perbedaan pendapatan timbul karena adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi terutama kepemilikan barang modal (*capital stock*). Pertumbuhan ekonomi yang cepat belum tentu dapat terjadi keberhasilan dalam pembangunan. Justru pertumbuhan ekonomi yang cepat akan berdampak terhadap ketimpangan dan distribusi pendapatan, karena sejatinya pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan pemerataan. Ada semacam *trade off* antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan pemerataan pendapatan dalam suatu pembangunan ekonomi. Ketika pembangunan ekonomi lebih ditunjukkan untuk pemerataan pendapatan maka pertumbuhan ekonomi akan membutuhkan waktu yang relatif

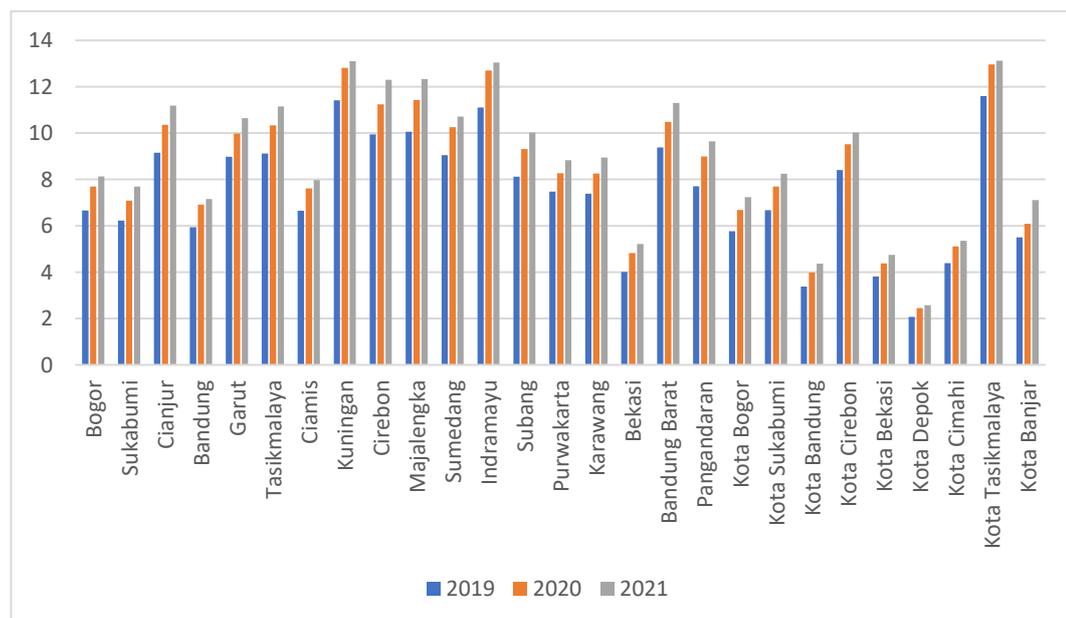
lama untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi. Begitu pula sebaliknya, jika pembangunan lebih difokuskan untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi maka akan semakin besar kemungkinan terjadinya ketimpangan dalam distribusi pendapatan (Kuncoro, 2006).

Ketimpangan distribusi pendapatan pada daerah-daerah dapat disebabkan oleh pertumbuhan dan keterbatasan yang dimiliki masing-masing daerah yang berbeda-beda serta pembangunan yang cenderung terpusat pada daerah yang sudah maju. Kemiskinan di Indonesia bukanlah prihal baru, telah diketahui dan diteliti oleh pemerintah jaman dahulu. Oleh karena itu, kemiskinan harus menjadi perhatian yang luas, karena kita dapat menemukan kemiskinan kemanapun kita pergi. Harganya mahal, tapi kita masih bisa menjumpai pejalan kaki dan pengemis (mengemis) di perdesaan masyarakat masih kekurangan pangan, itu semua cerminan kemiskinan, Indonesia harus benar-benar menyadari hal tersebut. Definisi kemiskinan kini telah diperluas, dan penyebabnya, indikatornya, dan masalah lain yang terkait dengannya menjadi semakin kompleks. Kemiskinan tidak hanya dilihat dari segi ekonomi, tetapi juga meluas ke aspek sosial, kesehatan, pendidikan bahkan politik.

Miskin dikategorikan sebagai ketidakmampuan seseorang memenuhi kebutuhannya sehari-hari terutama konsumsi, baik itu sandang maupun pangan. Berawal dari ketidakadilan dan kepedulian masyarakat lingkungan sekitar, kelompok ini terus terjadi penambahan. Dengan segala jenis tindakan mereka lakukan untuk bertahan hidup tanpa memandang baik maupun buruk. Pada dasarnya kemiskinan menggambarkan ketidakmampuan memiliki suatu barang akibat

rendahnya pendapatan. Lebih tepatnya tidak terpenuhi kebutuhan hidup dasar. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2006), definisi kemiskinan sebagai ketidakmampuan orang dalam memenuhi kebutuhan dasar minimum untuk dapat hidup secara layak.

Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan pembangunan ekonomi, yaitu kerjasama antara pemerintah dengan segenap lapisan masyarakat bertujuan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Selain PDRB dan IPM di Provinsi Jawa Barat, Keadaan kemiskinan juga mempengaruhi ketimpangan pendapatan, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Gambar 1.5 Persentase Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2019-2021

Sumber : BPS Jawa Barat 2022

Berdasarkan tabel 1.4 di atas keadaan kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat masih tergolong tinggi. Kemiskinan adalah istilah yang

digunakan untuk menggambarkan keadaan yang sangat miskin atau kekurangan kebutuhan dasar hidup, seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, dan akses ke layanan kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan sering kali diukur dari tingkat pendapatan, dimana orang yang hidup di bawah ambang batas pendapatan tertentu dianggap hidup dalam kemiskinan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh berbagai hal, termasuk faktor ekonomi, sosial, dan politik. Faktor ekonomi seperti upah rendah, pengangguran, dan kurangnya akses terhadap sumber daya keuangan dapat menyebabkan kemiskinan. Faktor sosial seperti diskriminasi, ketidaksetaraan, dan pengucilan sosial juga dapat berperan dalam melanggengkan kemiskinan. Faktor politik seperti korupsi, tata kelola pemerintahan yang lemah, dan kebijakan sosial yang tidak memadai juga dapat berkontribusi terhadap kemiskinan.

Dampak dari kemiskinan dapat sangat menghancurkan, tidak hanya pada individu dan keluarga, tetapi juga pada seluruh komunitas dan masyarakat. Kemiskinan dapat menyebabkan kekurangan gizi, penyakit, dan kurangnya akses terhadap layanan kesehatan dasar, pendidikan, dan layanan penting lainnya. Kemiskinan juga dapat membatasi kesempatan masyarakat, termasuk kemampuan mereka untuk mencari dan mempertahankan pekerjaan, memperoleh pendidikan, dan berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat. Mengatasi kemiskinan membutuhkan pendekatan multifaset yang mencakup peningkatan akses terhadap pendidikan, perawatan kesehatan, dan layanan penting lainnya, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan sistem sosial dan politik yang lebih adil. Tingginya persentase penduduk miskin dalam suatu wilayah berakibat menurunnya daya beli masyarakat karena pendapatan mereka rendah.

Pembangunan dalam lingkup spasial memang tidak selalu merata, ketimpangan pendapatan antar wilayah menjadi salah satu permasalahan yang sangat serius. Pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai tidak mampu untuk mengatasi masalah yang timbul akibat belum meratanya pembangunan dikarenakan juga terdapat beberapa daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat, tetapi beberapa daerah yang lain mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat. Daerah tersebut tidak mengalami perkembangan dan kemajuan yang sama, ini disebabkan oleh kurangnya sumberdaya yang dimiliki. Kemudian adanya alokasi investasi yang tidak merata di beberapa daerah, tingkat mobilitas faktor produksi rendah antar daerah, indeks pembangunan manusia yang berbeda antar daerah, alhasil akan menyebabkan ketimpangan dan perbedaan pendapatan antar daerah tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis mengangkat topik dalam penelitian ini dengan judul. **“PENGARUH PDRB, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, DAN KEMISKINAN TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2012-2021”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah penelitian di atas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh secara parsial Produk Domestik Regional Bruto terhadap ketimpangan pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana pengaruh secara parsial Indeks Pembangunan Manusia terhadap ketimpangan pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat?

3. Bagaimana pengaruh secara parsial Kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat?
4. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, dan Kemiskinan secara bersama-sama terhadap ketimpangan pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh PDRB terhadap ketimpangan pendapatan antar daerah di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2021.
2. Mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan pendapatan antar daerah di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2021.
3. Mengetahui pengaruh kemiskina terhadap ketimpangan pendapatan antar daerah di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2021.
4. Mengetahui pengaruh PDRB, indeks pembangunan manusia dan kemiskinan secara bersama-sama terhadap ketimpangan pendapatan antar daerah di Provinsi Jawa Barat tahun 2012-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak, adapun kegunaan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan pada bidang ekonomi terutama mengenai ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat.

2. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat dan kabupaten/kota, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan yang mengarah pada proses pembangunan daerah.

3. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan wawasan serta pengetahuan dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di 18 Kabupaten yang ada di Jawa Barat meliputi Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, Bandung Barat dan Pangandaran. Beserta 9 Kota di Jawa Barat yang meliputi Bogor, Sukabumi, Bandung, Cirebon, Bekasi, Depok, Cimahi, Tasikmalaya, dan Banjar. Dalam hal ini penulis menggunakan data sekunder yang didapatkan melalui website resmi dari Jabar Open Data dan Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada semester ganjil tahun ajaran 2022/2023 dengan perkiraan pelaksanaan selama 8 bulan yaitu pada bulan September 2022 sampai bulan Mei 2023.

